

# Newsletter Pusdatin



## Daftar Isi

- **Kapusdatin Kementan Kunjungi BSSN, Bahas Persiapan Rakornas PIIV 2025, Halaman 1**
- **Sosialisasi SPBE di Sumatera Barat: Perkuat Keamanan Informasi dan Dorong Pemanfaatan TTE, Halaman 3**
- **Perkuat Keamanan Sistem, Pusdatin Lakukan Sosialisasi CMS, Halaman 5**
- **Kementan Turut Mendukung Program SPHP Beras: Harga Beras Stabil, Terjangkau dan Tersedia Untuk Masyarakat Luas, Halaman 6**
- **Survei Indeks Produksi Perkebunan di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, Halaman 7**
- **Evaluasi Statistik Pertanian Hortikultura Triwulan I-II Tahun 2025, Halaman 9**
- **Pusdatin Berpartisipasi dalam Penyusunan Laporan Nasional Implementasi Konvensi Keanekaragaman Hayati ke-7, Halaman 11**

**Mohon Kesediaannya Untuk Mengisi Survei Kepuasan**



[bit.ly/surveipusdatin](https://bit.ly/surveipusdatin)

## Kapusdatin Kementan Kunjungi BSSN, Bahas Persiapan Rakornas PIIV 2025

Pada Rabu (20/08/2025), Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Kapusdatin) Kementerian Pertanian, Intan Rahayu, melakukan kunjungan kerja ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kunjungan tersebut disambut oleh Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi (Kapusdatik) BSSN, Taufik Arianto, yang bersama jajarannya menggelar Rapat Koordinasi Nasional Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital (Rakornas PIIV) 2025. Pertemuan ini menjadi langkah penting menuju penyelenggaraan Rakornas yang akan berlangsung pada 23 September 2025 di Aula BSSN, Sawangan, Kota Depok.



*Persiapan Rakornas PIIV 2025 di Kantor BSSN Sawangan Kota Depok*

Dalam rapat persiapan tersebut, kedua belah pihak sepakat bahwa Rakornas harus menjadi forum konsolidasi lintas sektor yang mampu memperkuat koordinasi penyelenggara PIIV. Intan Rahayu

# Tim Redaksi

**Penanggung Jawab:**

**Kepala Pusat Data dan  
Sistem Informasi Pertanian**

**Redaktur:**

**Kepala Bagian Umum**

**Editor:**

**Roydatul Zikria, S.Si., M.S.E  
Dr. Nugroho Setyabudhi, S.Kom., MM  
Ir. Wieta Barkah Komalasari, M.Si  
Suyati, S.Kom  
Apriadi Setiawan, S.Kom, MT  
Lilik Wulaningtyas, S.Kom**

**Fotografer:**

**Sri Lestari, SE  
Iswadi**

**Desain Grafis:**

**Dhanang Susatyo, SE  
Muchammad Eko Darwanto, ST**

**Sekretariat:**

**Rizky Purnama R, S.Kom  
Didik Pratama Saputra, S.Kom  
Rahma Andany, S.Kom  
Yusri Ardi, S.Kom  
Marwati  
Priatna Sari**

## Alamat Redaksi



**PUSAT DATA DAN  
SISTEM INFORMASI PERTANIAN  
Jl. Harsono RM No. 3 Gd D Lantai IV,  
Ragunan - Jakarta 12550  
Telp : 021- 7822638  
e-mail : layanan.data@pertanian.go.id**

menegaskan bahwa Kementerian Pertanian siap berkontribusi dalam agenda nasional ini. “Kementerian Pertanian melalui Pusdatin berkomitmen mendukung penuh PIIV. Rakornas nanti harus menjadi wadah sinergi agar setiap sektor dapat bersama-sama memperkuat ketahanan siber nasional”, ujar Intan.

Taufik Arianto menyampaikan pandangannya, “Rakornas tahun ini akan difokuskan pada pemetaan keterkaitan antar sektor. Melalui Rakornas ini, kita ingin memastikan adanya peta interdependensi nasional. Hal ini penting untuk mengantisipasi risiko yang berpotensi menimbulkan dampak berjenjang, sekaligus mempercepat proses pemulihan bila terjadi insiden siber”, jelasnya.

Isu interdependensi atau saling ketergantungan memang menjadi substansi utama dalam persiapan Rakornas. Dalam dunia digital saat ini, tidak ada sektor yang benar-benar berdiri sendiri. Layanan publik yang kita gunakan sehari-hari saling terhubung satu sama lain. Gangguan pada satu layanan bisa menjalar ke sektor lain dan menimbulkan efek berantai. Misalnya, jika sistem kependudukan digital terganggu, masyarakat akan kesulitan mengurus KTP atau dokumen identitas lain. Dampaknya bisa meluas ke sektor perbankan yang membutuhkan verifikasi data nasabah, hingga ke layanan kesehatan yang membutuhkan identitas pasien untuk pendaftaran. Situasi seperti ini dikenal dengan istilah *cascading effect*, dan jika tidak diantisipasi dapat berpotensi memicu krisis berskala nasional.

Rakornas PIIV 2025 akan mengangkat tema Memperkuat Sinergi Melalui Strategi Pemetaan Interdependensi Infrastruktur Informasi Vital untuk Membangun Perisai Siber dalam Rangka Keamanan Siber Nasional. Tema ini menggambarkan tekad pemerintah untuk membangun kesadaran kolektif lintas sektor. Dengan pemetaan interdependensi, setiap instansi diharapkan dapat mengetahui titik rawan, memahami risiko, serta menyiapkan langkah mitigasi agar gangguan yang muncul tidak meluas ke sektor lain.

Selain membahas interdependensi, Rakornas juga akan memaparkan progres implementasi Infrastruktur Informasi Vital (IIV) yang telah berjalan sejauh ini. Diantaranya adalah pembentukan Tim Teknis Infrastruktur Sektor (TTIS), penyusunan peta jalan sektor, penunjukan unit pengampu, serta perkembangan identifikasi IIV di berbagai instansi. Semua capaian ini akan menjadi dasar untuk menyusun strategi bersama dalam memperkuat perlindungan IIV ke depan.

Rakornas juga akan menyoroti empat pilar utama ketahanan siber nasional. Pilar pertama adalah identifikasi dan penetapan IIV, agar jelas sistem mana saja yang harus diprioritaskan perlindungannya. Pilar kedua adalah pemahaman interdependensi, untuk memetakan hubungan antar sektor yang saling terkait. Pilar ketiga adalah penilaian risiko siber, agar potensi ancaman bisa dikenali sejak dini. Pilar keempat adalah respon dan manajemen krisis, yang memastikan setiap insiden dapat ditangani secara cepat, terkoordinasi, dan efektif.



*Intan Rahayu (Kapusdatin Kementan, ketiga dari kiri) dan Taufik Arianto (Kapusdatik BSSN, ketiga dari kanan) se usai rapat persiapan Rakornas PIIV 2025 di Kantor BSSN Sawangan, Kota Depok*

Melalui kunjungan dan rapat persiapan ini, baik Pusdatin Kementan maupun Pusdatik BSSN menegaskan komitmen mereka untuk menyukseskan Rakornas PIIV 2025. Forum nasional tersebut diharapkan tidak hanya menghasilkan dokumen strategi, tetapi juga langkah nyata dalam memperkuat kerja sama lintas sektor. Pada akhirnya, Rakornas ini

ditujukan untuk membangun perisai siber nasional yang kokoh, sehingga layanan publik tetap terjamin meskipun menghadapi ancaman siber yang semakin canggih.

Penulis : Nugroho Setyabudhi

## Sosialisasi SPBE di Sumatera Barat Perkuat Keamanan Informasi dan Dorong Pemanfaatan TTE

**P**usat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan komitmennya untuk memperkuat transformasi digital melalui pengelolaan keamanan informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik (TTE). Komitmen ini disampaikan dalam kegiatan Koordinasi dan Sosialisasi Pedoman, Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE Lingkup Kementan dan Pemanfaatan TTE. Acara tersebut digelar pada 7–8 Agustus 2025 di Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Padang Mengatas dan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Provinsi Sumatera Barat. Tim Pusdatin dipimpin langsung oleh Teuku Ardhianzah Dewantara Silang selaku Ketua Kelompok Kerja Keamanan Siber dan Pelindungan Data Pribadi (PDP) Pusdatin.

“Sosialisasi ini tidak hanya berfokus pada pedoman manajemen keamanan informasi SPBE, tetapi juga pada penerapan standar teknis keamanan digital dan pemanfaatan TTE sebagai instrumen legalitas dokumen elektronik”, ujar Ardhianzah pada saat pembukaan acara.



*Pemaparan Tim Pusdatin pada Sosialisasi Pedoman Keamanan SPBE di BPTU-HPT Padang Mengatas, Sumatera Barat*

Menurut Yenni, pedoman tersebut berfungsi sebagai acuan standar manajemen keamanan informasi, menjamin keberlangsungan layanan SPBE, serta meminimalkan risiko keamanan berdasarkan prinsip kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan. Ia merinci enam tahap penting manajemen keamanan informasi, mulai dari penetapan ruang lingkup, penanggung jawab, perencanaan program kerja, dukungan operasional, evaluasi kinerja, hingga perbaikan berkelanjutan.

“Aspek teknis keamanan SPBE meliputi perlindungan data (klasifikasi, enkripsi, pembatasan akses), keamanan aplikasi *web* dan *mobile* (uji penetrasi, validasi input, proteksi *Application Programming Interface*, sistem penghubung layanan (kontrol integrasi data, proteksi *Distributed Denial of Service*, enkripsi migrasi data), keamanan jaringan internal (*firewall*, *Virtual Private Network*, *Intrusion Detection System/Intrusion Prevention System*, *access point* nirkabel), hingga keamanan pusat data (standar SNI, *backup* berkala, pembatasan akses administrator jarak jauh)”, tambah Yenni.

Tujuan utama pedoman ini adalah memastikan setiap layanan digital di Kementerian Pertanian terlindungi dari ancaman siber. Dengan begitu, masyarakat maupun pemangku kepentingan dapat memperoleh jaminan bahwa data dan informasi yang dikelola kementerian aman, utuh, dan terpercaya.

Sesi berikutnya dipandu oleh Nugroho Setyabudhi, Ketua Tim Kerja Keamanan Siber Pusdatin, yang menguraikan implementasi TTE lingkup Kementerian Pertanian. Menurutnya, TTE adalah informasi elektronik yang dilekatkan atau terkait dengan dokumen digital, berfungsi sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Dasar hukum pemanfaatan TTE di Kementan cukup kuat, mulai dari Keputusan Menteri Pertanian Nomor 323/Kpts/TU.120/M/3/2022, Surat Edaran Sekjen Nomor 2217 Tahun 2021, hingga Perjanjian Kerja Sama dengan BSSN tahun 2020 tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik.

“TTE memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Melalui TTE, kita bisa memastikan dokumen digital tetap otentik, tidak berubah setelah ditandatangani, dan dapat diverifikasi keasliannya”, tegas Nugroho.

Ia kemudian menjelaskan prosedur pengajuan TTE. Saat ini semua ASN dapat mempunyai TTE dengan melakukan pendaftaran TTE secara mudah melalui aplikasi MyASN dari Badan Kepegawaian Negara. Selanjutnya, proses verifikasi data dilakukan secara otomatis melalui Aplikasi Manajemen Sertifikat Elektronik (AMS) dari Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN, yang kemudian mengirimkan notifikasi ke email pegawai untuk setiap tahapan pengajuan sertifikat elektronik.

Setiap pegawai yang mengajukan TTE harus melalui dua tahap, yaitu aktivasi akun dan pembuatan *passphrase*. Aktivasi akun dilakukan dengan mengisi data pribadi (nama lengkap, NIK, gelar, email, nomor telepon), data kedinasan (NIP, unit organisasi, jabatan, provinsi), serta melakukan verifikasi foto diri. Setelah itu, pegawai akan membuat *passphrase* minimal 8 karakter dengan kombinasi huruf besar, kecil, angka, dan simbol khusus.

Nugroho menambahkan bahwa dokumen PDF yang telah ditandatangani secara elektronik dapat diverifikasi menggunakan aplikasi Adobe Reader, aplikasi BeSign dari BSrE-BSSN di perangkat Android/iOS, atau dengan mengunggah dokumen ke laman resmi Kementerian Komunikasi Digital di <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>.

“Kita ingin seluruh pegawai terbiasa menggunakan TTE, karena inilah fondasi legalitas dokumen di era digital. Dengan cara ini, proses administrasi bisa lebih cepat, efisien, sekaligus aman dari risiko manipulasi”, pungkas Nugroho.



Tim Pusdatin dan Tim BPTU-HPT Padang Mengatas sesuai acara Sosialisasi Pedoman Keamanan SPBE .

Melalui sosialisasi ini, Tim Pusdatin Kementan telah mengupayakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. Dengan mengedepankan pedoman keamanan informasi yang komprehensif serta pemanfaatan teknologi legal seperti TTE, Kementan berharap birokrasi ke depan semakin modern, efisien, dan terpercaya di era digital.

Penulis : Nugroho Setyabudhi

## Perkuat Keamanan Sistem, Pusdatin Lakukan Sosialisasi CMS

Pada Kamis (07/08/2025) Tim Kerja Aplikasi Sistem Informasi dari Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) melakukan kunjungan kerja ke dua satuan kerja di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), yaitu Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Padang Mengatas dan Balai Veteriner (BVet) Bukittinggi.



Sosialisasi Content Management System oleh tim Pusdatin

Dalam kunjungan tersebut, Tim Pusdatin yang dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Sistem Jaringan Komputer Dedi Soleman dan Ketua Tim Kerja Aplikasi Sistem Informasi Bambang Sugianto, disambut oleh Ketua Tim Kerja Informasi Veteriner serta Kepala Balai BVet Bukittinggi.

“Pertemuan ini bertujuan untuk melakukan sosialisasi sekaligus pelatihan penggunaan *Content Management System* (CMS) yang direkomendasikan Pusdatin bagi satuan kerja (satker) lingkup Ditjen PKH”, kata Dedi.



Tim Pusdatin dan Tim BPTU-HPT Padang Mengatas sesuai acara Sosialisasi Pedoman Keamanan SPBE .

Pada kesempatan itu, Tim Pusdatin juga memaparkan materi tentang Manajemen Aplikasi Digital dan Keamanan Data sebagai landasan penerapan CMS lingkup Kementerian Pertanian. Materi tersebut menekankan pentingnya standarisasi aplikasi digital, pengelolaan informasi publik yang transparan, serta jaminan keamanan data yang lebih kuat melalui pembaruan aplikasi secara rutin.

“CMS diperkenalkan sebagai solusi untuk memudahkan proses diseminasi informasi, pemeliharaan aplikasi yang lebih sederhana dan terpusat, serta peningkatan keamanan sistem”, ujar Bambang. Dalam kesempatan tersebut, juga dibahas mengenai migrasi data dari website lama. Proses migrasi akan dilakukan secara manual untuk memastikan setiap data sesuai dengan format dan jenis *file* yang tepat.

Penerapan CMS ini juga telah sesuai dengan standar penilaian informasi publik, mengingat pengembangannya dilakukan melalui koordinasi dengan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan. Dengan demikian, satker pengguna dapat menyampaikan informasi kepada masyarakat secara lebih cepat, terstruktur, dan transparan.

Baik BPTU-HPT Padang Mangatas maupun BVet Bukittinggi menyambut baik penggunaan CMS dan menyatakan kesiapan untuk segera mengimplementasikannya. Pusdatin menegaskan bahwa pendampingan akan terus dilakukan hingga CMS berjalan optimal di masing-masing satker.

Penulis : Lilik Wulaningtyas

## Kementan Turut Mendukung Program SPHP Beras: Harga Beras Stabil, Terjangkau dan Tersedia Untuk Masyarakat Luas

Sejak diluncurkan tanggal 18 Juli 2025, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras dianggap sukses. Program ini merupakan instrumen penting dalam menjaga daya beli masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan tetap mengendalikan inflasi. Melalui program ini, pemerintah berharap dapat menjaga stabilitas harga pangan, melindungi daya beli masyarakat, serta memastikan seluruh lapisan masyarakat memiliki akses terhadap pangan berkualitas dengan harga yang wajar.



Mentan Amran Sulaiman menghadiri Launching Program SPHP Beras di Kantor Pos Besar Fatmawati.

Distribusi Beras SPHP dilakukan melalui pedagang pengecer mitra Perum Bulog di pasar rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, outlet pangan binaan dan Gerakan Pangan Murah, kantor/outlet BUMN (Perum Bulog, ID FOOD, PT. Pos Indonesia, PT. Perkebunan Nusantara, dan Pupuk Indonesia Holding Company) sebagai pengecer, serta instansi pemerintah (kementerian/lembaga, TNI/Polri, Pemerintah Daerah, Unit Pelaksana Teknis

(UPT) Kementerian Pertanian dan lainnya).

Beras SPHP tersedia dengan harga terjangkau sesuai pembagian zona wilayah, yakni Zona 1: Rp12.500/kg, Zona 2: Rp13.100/kg, dan Zona 3: Rp13.500/kg. Harga tersebut ditetapkan untuk menjaga keterjangkauan bagi masyarakat sekaligus memastikan distribusi yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

Seiring dengan berjalannya program SPHP ini, penyaluran beras juga dilaksanakan dengan menggandeng Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) untuk mendistribusikan beras SPHP dengan total target 800 ribu ton. Kolaborasi ini berjalan mulai September sampai Desember 2025.

Menteri Pertanian sebagai salah satu inisiator agar seluruh BUMN Pangan bisa menjadi outlet SPHP, turut mengerahkan seluruh UPT Lingkup Kementan untuk berpartisipasi dalam program SPHP Beras. Ada 20 UPT di 11 Provinsi yang telah berpartisipasi sampai pertengahan September ini dengan volume penjualan hampir 25 ton dan omzet Rp 293,5 juta.

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) Kementerian Pertanian turut mendukung pelaksanaan Program SPHP lingkup Kementan dengan menyiapkan aplikasi pelaporan realisasi SPHP di UPT. Sosialisasi pengisian Laporan Harian Penyaluran SPHP Beras telah dilaksanakan pada Jum'at (22/08/2025) oleh Pusdatin secara daring dan dipimpin oleh Ketua Kelompok Data Non Komoditas Mokhammad Subehi. Sosialisasi diikuti oleh seluruh UPT lingkup Kementerian Pertanian. Pelaporan dilakukan dengan menginput data ke dalam Google Form yang telah disiapkan oleh Pusdatin.

“Pemesanan beras dari Bulog dilakukan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan Penyaluran SPHP Beras diawali secara internal dengan melakukan identifikasi kebutuhan SPHP beras. Tahap berikutnya adalah melakukan koordinasi dengan Kantor Cabang Bulog setempat sebagai penyedia SPHP beras untuk mendapatkan pasokan beras. Pemesanan dilakukan dengan membuat akun terlebih dahulu melalui Klik SPHP. Maksimal pembelian per hari hanya 2 ribu kg saja dan jika ada penambahan pembelian bisa dilakukan di hari berikutnya”, jelas Subehi.

Sementara itu, Tim Data Ekonomi Pertanian, Kelompok Data Komoditas Pusdatin belum lama ini melakukan monitoring pelaksanaan Program SPHP Beras di 3 UPT Kementan yaitu Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPM SOH) Bogor, Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Bogor dan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor. Monitoring yang dipimpin oleh Ketua Tim Data Ekonomi Pertanian Sri Wahyuningsih dilakukan untuk melakukan verifikasi realisasi SPHP Beras yang datanya telah dilaporkan.

“Kegiatan penyaluran SPHP beras dilakukan hampir semua UPT melalui outlet yang dikelola oleh Koperasi internal. Secara umum kendala yang dialami UPT Kementan dalam pelaksanaan program SPHP Beras lebih kepada proses pengajuan yang membutuhkan waktu relatif lama, sistem pembayaran yang harus dilakukan langsung tanpa tempo, serta biaya distribusi yang menambah harga pokok penjualan” ujar Sri Wahyuningsih.

Kendala lebih spesifik yang dihadapi kegiatan Penyaluran SPHP Beras oleh BBPM SOH adalah kekuatiran akan adanya reaksi pedagang sekitar karena harga beras SPHP yang di bawah harga pasar. Terutama karena lokasi kantor berdekatan dengan 3 pasar tradisional sekitar yakni Pasar Prumpung, Pasar Parung, dan Pasar Serpong. Secara tidak langsung hal tersebut menimbulkan kekhawatiran pedagang terkait adanya persaingan harga beras yang beredar di masyarakat. Oleh sebab itu BBPM SOH memberikan batasan stok maksimal 50 pack (250 kg) yang dipesan di Klik SPHP agar tidak terlalu banyak menyimpan stok. Beras disimpan sebagian di lobby depan dan sebagian di ruang kerja Bagian Umum BBPM SOH.

Kualitas beras SPHP juga menjadi kendala dalam pemasaran karena preferensi konsumen cenderung memilih beras pulen. Beras SPHP yang pera biasanya dicampur dengan beras lain untuk menghasilkan beras yang lebih pulen. Solusi lainnya adalah dengan menambahkan air lebih banyak saat memasak. Beras SPHP yang pertama dibeli oleh BBPM SOH sempat dilakukan retur atau pengembalian sebanyak 5 pack karena berketu. Hal ini diperkirakan karena penyimpanan beras SPHP oleh Bulog yang sudah dilakukan dalam waktu yang cukup lama.

Sedikit berbeda dengan Polbangtan Bogor di mana menjual SPHP beras dengan harga yang sama dengan harga pembelian dari Bulog. yaitu Rp 55.000 per pack atau Rp 11.000 per kg. Sementara biaya operasional ditanggung oleh Polbangtan Bogor. Selain SPHP beras, Polbangtan Bogor juga menjual komoditas pangan lain pada saat bazar seperti gula, minyak goreng, dan telur ayam.



Tim Data Ekonomi Pertanian Pusdatin melakukan Monitoring Pelaksanaan Program SPHP Beras di BBPM SOH Bogor

Sesuai dengan komitmen Pemerintah, program penyaluran beras SPHP akan terus dilakukan hingga akhir tahun 2025, bahkan bila perlu berlanjut sampai awal 2026. Pemerintah memiliki cadangan beras yang cukup besar, yakni sekitar 1 juta ton dari target 1,3 juta ton yang belum tersalurkan.

Untuk itu, masyarakat tidak perlu khawatir soal ketersediaan beras. Memasuki musim panen kedua pada September ini, stok pangan dipastikan aman. Saat ini stok beras dalam kondisi cukup sehingga masyarakat tidak perlu resah.

Penulis : Wieta B. Komalasari

## Survei Indeks Produksi Perkebunan di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat

Upaya pengumpulan data produksi perkebunan yang dilaksanakan oleh Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Sekretariat Direktorat Jenderal (Setditjen) Perkebunan, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dan Dinas Pertanian Kabupaten Garut melakukan Survei Indeks Produksi Perkebunan di Kecamatan Leles Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan suatu ukuran statistik yang menggambarkan

perubahan volume produksi atau hasil dari sektor perkebunan dari waktu ke waktu, biasanya dibandingkan dengan periode referensi tertentu. Bagi pemangku kepentingan, data ini digunakan untuk merencanakan strategi peningkatan hasil, menganalisis tren produksi dalam pengambilan keputusan berinvestasi dan memantau pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun di sektor perkebunan.

Sebelum survei dimulai, Anna Astrid Susanti selaku Ketua Kelompok Data Komoditas Pusdatin, Asep Syaefudin selaku Ketua Tim Kerja Data dan Informasi Setditjen Perkebunan dan Wahyunindarsih Statistisi Madya dari BPS beserta Tim Survei melakukan koordinasi di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Garut dengan Ardhy Firdian selaku Kepala Bidang Sarana dan Asep Muzni selaku Penyuluh Pertanian.



*Koordinasi Tim Survei Indeks Produksi Perkebunan di Kantor Dinas*

“Target responden Survei Indeks Produksi Perkebunan sebanyak 40 petani sampel yang mengusahakan tanaman tembakau. Petani sampel berasal dari Desa Lembang, Ciburial, Kendangmukti, Jangkurang, Cipancar, Sukarame, Dano, Cangkuang, Haruman dan Margaluyu Kecamatan Leles Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat. Survei dilaksanakan di Kantor Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Leles pada tanggal 28 Agustus 2025 dengan metode wawancara”, jelas Anna. Kuesioner didistribusikan ke Tim Pusdatin (12 kuesioner), Tim Setditjen Perkebunan (19 kuesioner), Tim BPS (6 kuesioner) dan Tim Dinas Provinsi (3 kuesioner).

“Komoditas tembakau di Kabupaten Garut mempunyai kontribusi sebesar 35 persen dari total produksi tembakau di Jawa Barat. Varietas yang ditanam di kabupaten tersebut sudah tersertifikasi yaitu Tegar A1, Tegar A2 dan Tegar D.

Pada umumnya, penanaman tembakau di Kabupaten Garut dilakukan di bulan Februari-Maret, sehingga panennya terjadi di bulan Juni-Juli. Umumnya tanaman tembakau dibongkar habis di bulan Agustus”, kata Ardhy.

Budidaya tembakau dilakukan pada saat musim tanam kedua (MT 2), sebagai pergiliran tanaman padi dan tanaman palawija. Kebiasaan petani tembakau dalam menjual hasilnya dalam wujud mole (tembakau rajang kering), walaupun masih ada yang menjual dalam wujud daun basah maupun daun kering (krosok). Harga tembakau saat ini sebesar Rp 50.000,- hingga Rp 60.000,- per kg. Pada saat kondisi iklim dan budidaya sangat bagus maka akan mempengaruhi kualitas yang baik sehingga harga tembakau dapat mencapai Rp 100.000,- hingga Rp 120.000,- per kg.

Salah satu responden petani tembakau yang diwawancarai bernama Ajat Sudrajat yang beralamat di Rt 002/016 Desa Margaluyu Kecamatan Leles Kabupaten Garut berusia 60 tahun, dengan tamatan Pendidikan Dasar. “Saat ini saya mengusahakan dua jenis tanaman perkebunan yakni tembakau seluas 3.000 m<sup>2</sup> yang ditanam di lahan tegalan milik sendiri serta kopi sebanyak 600 pohon di lahan lainnya. Hasil panen tembakau sebanyak 100 kg daun basah, kemudian dijual dalam wujud mole dengan harga Rp 70.000,- per kg”, kata Ajat.

Ajat juga menjelaskan bahwa pemeliharaan tanaman tembakau meliputi pemupukan NPK dan ZA masing-masing 2 kali selama masa pertumbuhan tanaman tembakau. Selain itu dilakukan juga pengendalian gulma/OPT menggunakan herbisida/pestisida, penyiraman tanaman, penyulaman serta pembuangan tunas daun pada ketiak batang agar pertumbuhan daun tembakau menjadi optimal.

Setelah selesai melakukan survei, dilakukan verifikasi dan validasi data dari hasil wawancara. Setelah itu dilakukan input data tersebut ke tautan yang telah disiapkan.



Penjelasan Survei Indeks Produksi Perkebunan ke Petani



Wawancara dengan Petani Sampel di Kantor BPP Kabupaten Garut

Penulis : Diah Indarti

## Evaluasi Statistik Pertanian Hortikultura Triwulan I-II Tahun 2025

Evaluasi Statistik Pertanian Hortikultura Triwulan I – II Tahun 2025 dilaksanakan secara daring pada Senin (1/09/2025). Acara dibuka oleh Diah Ismayaningrum, S.P., SE selaku Koordinator Kelompok Data, Evaluasi dan Pelaporan Direktorat Jenderal Hortikultura. Peserta rapat di hadiri oleh : (1) Perwakilan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura; (2) Perwakilan Direktorat Sistem Informasi Statistik, Badan Pusat Statistik; (3) Perwakilan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Kementerian

Pertanian; (4) Perwakilan Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat, Kementerian Pertanian; dan (5) Perwakilan Direktorat Buah dan Florikultura, Kementerian Pertanian.

Pertemuan ini membahas presensi pelaporan data Statistik Pertanian Hortikultura (SPH) berdasarkan aplikasi Sistem Penyediaan Data Statistik Pertanian Hortikultura (SIPEDAS).

Evaluasi Statistik Pertanian Hortikultura Sayuran Buah-buahan Semusim (SPH-SBS) Angka Sementara Triwulan II tahun 2025 dilakukan berdasarkan hasil revalidasi SPH Online per tanggal 29 Agustus 2025. Presensi pelaporan data SPH-SBS pada Triwulan II 2025 secara kumulatif (Januari-Juni) sebesar 88,37persen.

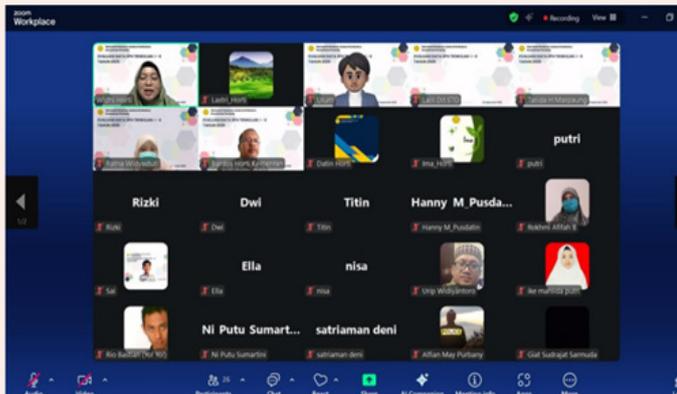
Pada kelompok tanaman SPH-SBS, tanaman yang mengalami peningkatan produksi adalah buncis, cabai keriting, cabai rawit, jamur tiram, kembang kol, kentang, kubis, stroberi, tomat, dan wortel. Sementara itu, komoditas lainnya mengalami penurunan produksi. Komoditas yang mengalami penurunan produksi secara signifikan antara lain petsai/sawi, kacang panjang, bawang daun, dan bawang putih.

Evaluasi Statistik Pertanian Hortikultura Buah-buahan Sayuran Tahunan (SPH-BST) Triwulan II tahun 2025 dilakukan berdasarkan data per tanggal 29 Agustus 2025. Presensi pelaporan data 83,68 persen. Pada kelompok tanaman SPH-BST, tanaman yang mengalami peningkatan produksi adalah alpukat, apel, buah naga, nenas, pepaya, dan salak. Sementara itu, komoditas lainnya mengalami penurunan. Secara nasional, terdapat 21 komoditas BST mengalami penurunan produksi, sedangkan 6 komoditas lainnya mengalami kenaikan produksi yaitu salak, nenas, buah naga, pepaya, alpukat, dan apel. Penurunan produksi terbesar terjadi pada komoditas durian, rambutan, duku/ langsung/kokosan, dan mangga.

Evaluasi Statistik Pertanian Hortikultura Tanaman Biofarmaka (SPH-TBF) Triwulan II tahun 2025 dilakukan berdasarkan data per tanggal 29 Agustus 2025. Presensi pelaporan data SPH-TBF adalah 87,61 persen. Pada kelompok tanaman biofarmaka, peningkatan produksi terjadi pada tanaman kapulaga, kencur, mahkota dewa, dan temulawak. Sementara itu tanaman lainnya mengalami penurunan produksi. Hanya empat komoditas yang

mengalami kenaikan yaitu kencur, kapulaga, temulawak, dan mahkota dewa. Komoditas yang mengalami penurunan produksi secara signifikan antara lain jeruk nipis, laos/lengkuas, jahe, serai hijau, dan kunyit.

Evaluasi Statistik Pertanian Hortikultura Tanaman Hias (SPH-TH) Triwulan II tahun 2025 dilakukan berdasarkan data per tanggal 29 Agustus 2025. Presensi pelaporan data SPH-TH adalah 87,40 persen. Komoditas yang mengalami peningkatan adalah bugenvil, pakis, dan cordyline.



Evaluasi data SPH Triwulan I-II Tahun 2025 Dilaksanakan Secara Daring

Pada kesempatan yang sama, dilaporkan progres SPH *Computer Assisted Web Interviewing* (CAWI) sebagai metode pengumpulan data hortikultura ke depan. “CAWI memungkinkan responden mengisi data secara mandiri melalui internet. Progres CAWI meliputi (1) Buku pedoman operasional dan video tutorial telah dibuat; (2) Sosialisasi akan di laksanakan pada bulan November; (3) Petugas input data di daerah mengusulkan akun kecamatan untuk input data dibuat lebih praktis”, jelas Sulistina.

Tanggapan dari Ketua Tim Kerja Data dan Informasi Widhiyanti Nugraheni dari Ditjen Hortikultura yaitu, “Sosialisasi SPH CAWI akan dilaksanakan secara berulang. Kami sudah berkoordinasi dengan BPPSDMP Kementan selaku pembina penyuluh. Namun BPPSDMP menyarankan agar sosialisasi dilakukan untuk semua wilayah dan dilakukan secara berkali-kali agar petugas yang tidak bisa ikut pada suatu waktu bisa ikut pada waktu sosialisasi berikutnya. Tugas dan fungsi pengumpulan data tetap pada penyuluh. Namun menkanismenya belum tahu seperti apa”.

Pada sesi diskusi, Urip dari Direktorat STPHP BPS memberikan usulan antara lain “(1)

Terkait presensi, karena tidak ada honornya sehingga mereka tidak melaporkan lagi, sama juga dengan tanaman pangan, sehingga datanya tidak muncul, dikhawatirkan akan berpengaruh ke depannya, jangan sampai semangat berhenti melaporkan berlanjut terus; (2) Perlu lebih concern kepada presensi masuk namun datanya 0. Misalnya pada beberapa wilayah yang membuat berita acara untuk tidak mengumpulkan data. Hal-hal seperti ini mudah-mudahan bisa diantisipasi karena perhitungan PDRB sampai Kabupaten/Kota”.

Sementara itu, Hanny dari Pusdatin menanggapi “Mungkin bisa diberikan justifikasi penyebab turunnya data seperti apa serta kualitas harus tetap diperhatikan. Saya melihat ada kemungkinan terkait penurunan data yang cukup signifikan, terutama di bawang merah, lahan dialihkan ke lahan padi. Kementan mempunyai program swasembada pangan. Petani biasanya menanam di lahan sawah, semenjak awal tahun curah hujan yang terjadi cukup tinggi (*range* diatas 50mm) sehingga lahan dialihkan ke lahan padi. Namun hal tersebut perlu di klarifikasi terutama di sentra lahan sawah. Berharap untuk data yang masuk melalui SPH CAWI bisa mendapatkan satu data, hingga antara pembinda dan produsen bisa mendapatkan data yang sama.”

Widhi dari Datin Hortikultura menanggapi “(1) Bulan Juli, kami sudah bersurat ke BPPSDMP tembusan ke Setjen dan Kapusdatin, agar penyuluh sebagai ujung tombak pengumpulan data SPH tetap melakukan tugas pengumpulan data SPH. Sudah berkoordinasi dengan BBPSDMP bahwa yang lebih berwenang melakukan pembahasan ini adalah pusdatin sebagai walidata; (2) Mohon bantuan Pusdatin untuk mengumpulkan semua eselon 1 untuk membahas tentang hal ini; (3) Terkait edit data di proses SPH CAWI ada prosesnya, tapi untuk waktu penguncian edit data belum ada karena melihat respon dari petugas pengumpul data apakah ada yang mengisi SPH CAWI.”

Kesepakatan bersama dari kegiatan ini dihasilkan beberapa kesimpulan yaitu : (1) Terkait dengan interoperabilitas, kita sepakati operasional harian, kami akan menyiapkan akun untuk BPS pusat maupun daerah, sehingga kita bisa menggunakan satu aplikasi yang sama; (2) Interoperabilitas antar *server*, keperluan

BPS seperti Simdasi tetap bisa dilaksanakan dengan baik; (3) Master wilayah bisa diberikan awal tahun; (4) Terkait data, perlu dicermati komoditas di wilayah yang absensi 100 persen namun data belum masuk, data turun, atau data 0.”

Penulis : Titin Agustina dan Suyati

## **Pusdatin Berpartisipasi dalam Penyusunan Laporan Nasional Implementasi Konvensi Keanekaragaman Hayati ke-7**

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber keanekaragaman hayati sangat tinggi. Keanekaragaman hayati tersebut dijadikan sebagai salah satu pondasi bagi pembangunan sektor pertanian. Sektor pertanian berperan sebagai penyedia pangan yang memanfaatkan keanekaragaman hayati untuk ketahanan pangan. Selain itu, sektor pertanian juga berperan sebagai penyedia produk-produk hulu berbasis kekayaan keanekaragaman hayati tinggi yang menjadi tulang punggung berkembangnya sektor-sektor hilir ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Keanekaragaman hayati dan pertanian sangat berkaitan karena merupakan pengatur penting fungsi agroekosistem, sebaliknya pertanian juga dapat berkontribusi terhadap konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hayati yang tepat dan berkelanjutan di sektor pertanian menjadi perhatian Kementerian Pertanian. Berbagai upaya yang dilakukan dalam menjaga keanekaragaman hayati antara lain penerapan budidaya pertanian ramah lingkungan, penerapan budidaya pertanian yang baik, pengembangan pertanian organik, pengelolaan plasma nutfah pertanian, pengembangan budidaya bahan pangan lokal, pemanfaatan bioteknologi untuk meningkatkan nilai tambah, dan penyusunan tata kelola pemanfaatan sumber daya genetik.

Sehubungan hal tersebut, Kementerian Pertanian yang diwakili Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) memiliki peran penting dalam penyusunan Laporan Keanekaragaman

Hayati dengan menyediakan data dan informasi pertanian yang valid, melakukan analisis data, serta memfasilitasi kolaborasi dengan berbagai pihak terkait untuk menghasilkan laporan yang akurat dan komprehensif mengenai keanekaragaman hayati pertanian Indonesia. *The National Report* (NATREP) ke-7 disusun untuk memantau dan mengevaluasi tingkat implementasi keanekaragaman hayati secara global. Laporan ini disusun oleh setiap negara pihak dan disampaikan dalam *Convention on Biological Diversity* (CBD).

Penyusunan NATREP ke-7 diawali dengan kegiatan *Coaching Clinic* pengisian Laporan Nasional ke-7 (NATREP-7) di Avenzel Hotel and Convention, Cibubur (25/08/2025). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), khususnya Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati.

Pada kegiatan tersebut, dibahas berbagai hal terkait Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biological Diversity*) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 5 Tahun 1994. Disampaikan bahwa penyusunan *The National Report* (NATREP) merupakan kewajiban setiap negara pihak untuk memantau dan mengevaluasi implementasi konvensi.

Selain itu, pertemuan juga menyoroti Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal (KMGBF) yang disepakati pada COP-15 CBD di Montreal tahun 2022. KMGBF menekankan visi “Hidup selaras dengan alam pada 2050” serta misi 2030 untuk menghentikan dan membalikkan laju kehilangan keanekaragaman hayati. Seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, LSM, akademisi, sektor swasta, komunitas lokal, perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, didorong untuk terlibat aktif.

Sebagai tindak lanjut, Indonesia tengah menyusun Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia (IBSAP) 2025–2045, yang terdiri dari 3 tujuan utama, 13 strategi, 20 target nasional, dan 95 kelompok aksi. Kementerian Pertanian berperan melalui program perlindungan spesies, pengendalian spesies invasif, pengurangan pencemaran, serta pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.

Adapun NATREP 7 Indonesia yang sedang

disusun (April 2025 – Februari 2026) akan berisi laporan mengenai langkah yang telah dilakukan, efektivitas program, capaian indikator nasional periode 2018–2025, serta status terbaru keanekaragaman hayati di Indonesia. Laporan ini bersifat kompilasi kontribusi berbagai pihak dan bukan merupakan penilaian kinerja lembaga tertentu.

Kegiatan *coaching clinic* ini bertujuan memastikan kelengkapan data, menyamakan persepsi antar-unit teknis lingkup Kementan, serta memberikan penjelasan teknis terkait matriks pengisian NATREP-7. Partisipasi aktif seluruh unit sangat ditekankan untuk menghasilkan laporan yang komprehensif dan sesuai dengan standar internasional. Kementerian Pertanian diharapkan dapat menarik manfaat strategis dalam kontribusinya terhadap pelestarian keanekaragaman hayati, sekaligus mendukung pencapaian target nasional dan komitmen global dalam kerangka CBD dan KMGBF.

Tindak lanjut dari kegiatan *coaching clinic*, Pusdatin kembali diundang oleh Kementerian Lingkungan Hidup selaku *National Focal Point* CBD pada tanggal 9-10 September 2025 untuk tahap penyusunan NATREP ke-7. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menganalisa data hasil rekapitulasi dari K/L yang telah terupdate. Pertemuan ini menjadi langkah penting untuk memastikan laporan akurat, komprehensif dan mencerminkan kondisi terkini keanekaragaman hayati Indonesia untuk sektor pertanian.

**Coaching Clinic Pengisian Data NATREP Lingkup Kementerian Pertanian** untuk Penyusunan Laporan Nasional ke-7 Implementasi Konvensi Keanekaragaman Hayati (7th National Report CBD)

**Tujuan Lokakarya:**

- Terhimpunnya data kontribusi dari Kementerian/Lembaga yang relevan dengan target IBSAP 2025–2045 dan NATREP 7
- Tersedianya bukti pendukung yang dapat digunakan dalam pelaporan nasional
- Tersusunnya masukan awal bagi sistem monitoring IBSAP 2025–2045
- Terwujudnya sinergi dan kolaborasi untuk memastikan keterpaduan dan kualitas data NATREP 7

**Hybrid**  
**Senin, 25 Agustus 2025**  
**Avenzel Hotel Cibubur**

**Peserta Rapat:**  
 Kementerian Pertanian  
 Republik Indonesia

**Offline** 8  
**Online** 19

Penulis : Hety Sulistiyowati dan Heri Dwi Martono



[satudata.pertanian.go.id](http://satudata.pertanian.go.id)